



Distorsi dan Politisasi Hadis dalam Politik Indonesia: Studi atas Gerakan 212

Safri Nur Jannah,^{1*} Nanda Ahmad Basuki²

¹Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia (ASILHA), Yogyakarta, ²Necmettin Erbakan University,
Turkiye

Email: safri17yk@gmail.com

**Corresponding author*

Article History: accepted: 17-6-2024; published: 30-12-2024

Abstract

This study examines how hadiths were misinterpreted and politicized within the realm of practical politics in Indonesia, with a particular focus on the 212 Movement and the 2017 Jakarta gubernatorial election. It seeks to analyze different ways hadiths were utilized for political purposes during the 212 Movement and how this influenced Ahok's electability. Using a literature review approach, the research incorporates Domke and Coe's theory of religious politicization and Vedi R. Hadiz's concept of Islamic populism to understand how religious texts—especially hadiths—were employed to rally public support. The study identifies four key methods of hadith politicization: altering context, misinterpreting meanings, selectively citing supportive hadiths, and using them as tools for mass mobilization. While the politicization of hadiths was not the sole factor behind Ahok's declining electability, it played a contextual role in shaping public opinion—evident through memes, posters, banners, digital content, and social media hashtags. The research also underscores the influence of digital news outlets and mainstream media in framing the narrative around the 212 Movement and swaying public sentiment. In conclusion, the politicization of hadiths significantly affected Indonesia's political landscape, especially during the events surrounding the 2017 Jakarta election.

Keywords: Misinterpretation of hadith; 212 Movement, hadith on digital society

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena misinterpretasi dan politisasi hadis dalam konteks politik praktis di Indonesia, dengan titik berat pada Aksi 212 dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk politisasi hadis yang muncul dalam Aksi 212 serta dampaknya terhadap tingkat keterpilihan Ahok dalam pemilihan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada teori politisasi agama dari Domke dan Coe, serta pendekatan populisme Islam menurut Vedi R. Hadiz, untuk memahami bagaimana ajaran agama—terutama hadis—dimanfaatkan dalam mobilisasi massa. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat pola penafsiran politis terhadap hadis dalam Aksi 212: manipulasi konteks, penyimpangan makna, seleksi hadis yang mendukung



narasi tertentu, dan penggunaan hadis sebagai alat mobilisasi. Walaupun politisasi hadis bukanlah faktor tunggal yang secara langsung menurunkan elektabilitas Ahok, penelitian ini menegaskan bahwa hal tersebut secara kontekstual turut membentuk persepsi publik, sebagaimana tercermin dalam berbagai ekspresi seperti meme, poster, spanduk, konten daring, dan tagar di media sosial. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran media massa digital dalam membingkai narasi Aksi 212 dan memengaruhi opini publik. Kesimpulannya, politisasi hadis memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinamika politik praktis di Indonesia, khususnya dalam konteks Aksi 212 dan Pilkada Jakarta 2017.

Kata Kunci: Misinterpretasi hadis; Aksi 212; hadis dalam dunia digital

Pendahuluan

Hadis sering kali dijadikan bagian dari praktik politik di Indonesia, termasuk dalam momen-momen pemilihan umum. Menjelang Pemilu 2024, misalnya, Denny Indrayana—seorang politisi dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM—mengutip hadis untuk memperkuat kritiknya terhadap Presiden Jokowi yang dianggap “cawe-cawe” dalam proses politik (Indrayana, 2023). Unggahan Denny di akun Twitter pribadinya pada 3 Juni 2023 menjadi contoh nyata bagaimana hadis dilibatkan dalam dinamika politik nasional.

Pengemasan teks-teks agama yang disisipkan dengan narasi politik (Muhajirin, 2016) terbukti menjadi alat yang efektif dalam konteks politik Indonesia (Abdallah, 2020). Fenomena politisasi hadis—atau lebih luasnya politisasi agama—hampir selalu hadir dalam setiap gelaran politik (Baswedan, 2004), terutama pascareformasi (Haris, 2021). Meski kerap tidak menghasilkan kemenangan secara praktis, politisasi agama terus dimanfaatkan oleh partai-partai berbasis Islam dan berbagai aktor politik lainnya dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah (Arigi, 2019). Contohnya adalah fatwa MUI yang mengharamkan golput menjelang Pemilu 2009, yang kemudian disusul oleh kemenangan Presiden SBY. Hal serupa juga terlihat pada Pemilu 2019, yang dipenuhi isu-isu sensitif terkait agama dan etnis (Azra, n.d.), menandakan bahwa politisasi agama terus berkembang dari masa ke masa dengan ragam bentuk yang semakin kompleks (Gueorguiev et al., 2019).

Dalam perjalanannya, misinterpretasi dan politisasi hadis tak lagi hanya dijalankan oleh elit politik, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput (Azhari, 2018). Hal ini dapat dengan mudah diamati melalui berbagai media massa dan platform digital seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Selain dalam bentuk video dan podcast, konten bernuansa politisasi hadis juga tersebar dalam berbagai format lain seperti meme, poster, cuitan, dan tagar. Bahkan, komentar-komentar warganet pun kerap memperlihatkan bagaimana isu ini hidup dan berkembang secara dinamis dalam ruang komunikasi publik yang lebih interaktif.

Selain digunakan untuk meraih dukungan dan simpati politik, hadis juga kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik. Contohnya bisa dilihat dalam kasus kontroversial yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, pada tahun 2017 (Prayogi, 2019). Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang signifikan dan bahkan dianggap sebagai momen kebangkitan Islam fundamentalis di Indonesia (Burhani, 2016). Perubahan besar dalam pola keberislaman dan kecenderungan

politik masyarakat saat itu (Maarif et al., 2023) memperkuat fenomena politisasi agama yang sedang berlangsung. Dalam kasus Ahok, selain ayat Al-Qur'an—terutama QS Al-Maidah ayat 51—yang menjadi pusat tuduhan penistaan agama, banyak hadis yang turut dikutip dan menyebar luas di masyarakat, termasuk narasi tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim (Melyani & Dalimounthe, 2020). Tingginya perhatian publik terhadap kasus ini membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi, mendorong umat Islam turun ke jalan melalui gerakan Aksi Bela Islam (Fanany & Fanany, 2020). Gerakan tersebut jelas tidak sepenuhnya digerakkan oleh semangat keagamaan semata, melainkan juga mencerminkan adanya fragmentasi otoritas dalam komunitas Muslim di Indonesia (Burhani, 2016).

Lebih jauh, kajian ini berupaya menggali berbagai kemungkinan yang muncul apakah hadis semata dijadikan alat politik hingga kehilangan otoritas keagamaannya, atau justru masih memiliki kekuatan independen dalam membentuk arah politik di Indonesia. Dengan kata lain, apakah narasi hadis, khususnya tentang kepemimpinan, sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan politik atau masih memiliki daya pengaruh tersendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian difokuskan pada dua hal utama: bentuk-bentuk politisasi hadis dalam Aksi 212 serta sejauh mana dampaknya terhadap elektabilitas Ahok (BBC, 2016) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Tulisan ini mengadopsi pendekatan metode campuran, yaitu melalui studi pustaka (library research) dan etnografi digital (cyber-ethnography). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai teks hadis yang tersebar di media cetak seperti koran, tabloid, majalah, serta buku dan jurnal ilmiah. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan representatif mengenai situasi sosial-politik pada saat itu.

Sementara itu, etnografi digital digunakan untuk menelusuri dan menganalisis data yang tersebar di ruang digital. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada isi berita, tetapi juga pada dinamika sosial yang tercipta di dunia maya, termasuk interaksi, respons, dan narasi publik yang terbentuk di berbagai platform media sosial. Respons dari para pengguna internet menjadi data penting dalam memahami realitas sosial-politik yang terbentuk secara daring.

Kajian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk ujaran yang mengandung indikasi misinterpretasi hadis dalam konteks politik, serta media yang digunakan untuk menyebarkan narasi tersebut, baik melalui media massa digital maupun media sosial sebab besarnya pengaruh yang muncul (Ahyyar & Alfitri, 2019). Empat portal berita digital dijadikan sumber utama yaitu *Tribunnews.com*, *CNN Indonesia*, *Kompas*, dan *Republika*. Selain itu, beberapa akun media sosial juga menjadi objek kajian, antara lain akun YouTube seperti *Kajian Islam Podcast*, *Felix Siau*, dan *Info Singkat Official*; akun Twitter seperti *@muslimbelaquran*, *@tgk_mahmudi*, *@andryannugraha*, *@sanggelombang*, dan *@bodiquee*; akun Facebook seperti *Bela Quran*, *Ar Rayyan*, *Ulum*, dan *Baso Aris Triwardana*; serta akun Instagram *Bela Quran*. Di samping itu, beberapa situs web seperti *tarbawia.com*, *Islami.co*, dan *medcom.id* turut digunakan sebagai referensi. Melalui pendekatan ini, tulisan ini berupaya menangkap bagaimana narasi keagamaan—terutama hadis—digunakan dan disebar dalam arena politik melalui berbagai kanal komunikasi modern.

Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat fenomena ini tidak sebagai kasus yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari tren yang lebih luas dan lintas negara (Altnordu, 2010). Politisasi agama merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia dan tidak terbatas pada satu agama saja. Negara-negara seperti Perancis, India, Turki, hingga Amerika Serikat juga mengalami gejala serupa (Ayata, 2003; Engelke, 2010). Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, penelitian ini mengacu pada buku *The God Strategy* karya David Domke dan Kevin Coe. Buku tersebut membedah keterlibatan agama dalam politik Amerika, khususnya bagaimana politisi, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, menggunakan simbol dan retorika agama demi meraih simpati publik. Domke dan Coe menganalisis pidato-pidato presiden sejak era Roosevelt hingga Bush, menyoroti elemen seperti diksi, intonasi, busana, dan media penyampaian. Salah satu contoh menarik adalah penggunaan frasa “God bless America” oleh Ronald Reagan dan pidato “The New Covenant” oleh Bill Clinton yang sarat nuansa religious (Domke & Coe, 2010).

Selain itu, pendekatan populisme Islam dari Vedi R. Hadiz dalam bukunya *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* turut menjadi referensi penting. Vedi melihat populisme Islam sebagai fenomena politik modern yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sosial, bukan semata interpretasi doktrin agama. Ia menyoroti perkembangan politik Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki (Ayata, 2003) dalam konteks ketimpangan sosial, globalisasi ekonomi, dan perjuangan menuju demokrasi. Kedua rujukan ini membantu penelitian untuk menelusuri bagaimana agama dimanfaatkan dalam arena politik serta bagaimana populisme Islam berkembang sebagai respon atas perubahan sosial yang kompleks (Hadiz, 2016).

Hasil dan Pembahasan

A. Fragmentasi Masyarakat dalam Aksi 212

Pada tanggal 2 Desember 2016, sekitar dua juta orang dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menyuarakan protes terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini dikenal dengan nama Aksi 212 atau Aksi Bela Islam III, dan juga disebut sebagai Aksi Damai 2 Desember. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang berlangsung pada 4 November, menjadikannya sebagai unjuk rasa besar kedua terhadap Ahok pada tahun 2016. Awalnya, kegiatan ini direncanakan digelar pada 25 November, namun akhirnya dijadwalkan ulang menjadi 2 Desember 2016 (Fanany & Fanany, 2020).

Unjuk rasa ini dipicu oleh pernyataan Ahok saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ucapan yang disampaikannya saat itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk penghinaan terhadap ajaran Islam, sehingga menimbulkan gelombang kemarahan publik. Pernyataan tersebut merujuk pada salah satu ayat Al-Qur’an, yakni Surah Al-Maidah ayat 51 (BBC, 2016), yang menjadi titik sorotan utama dalam kontroversi tersebut.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka

menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Sementara kutipan pidato Ahok adalah sebagaimana berikut *“kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu”*

Aksi 212 banyak merujuk pada Surah Al-Maidah ayat 51, khususnya pada kata *awliya’*. Di Indonesia, kata ini sering diterjemahkan sebagai “pemimpin,” sebagaimana dalam Tafsir al-Azhar oleh Hamka. Namun, tafsir klasik seperti *Jami’ al-Bayan* karya al-Thabari dan tafsir modern seperti milik Quraish Shihab lebih menekankan makna *awliya’* sebagai sekutu atau penolong dekat, bukan pemimpin politik (BBC, 2016).

Secara historis, para ulama sepakat bahwa ayat ini memiliki konteks turunnya (asbabun nuzul), meskipun versinya beragam. Beberapa riwayat menyebut keterlibatan tokoh seperti ‘Ubadah ibn al-Shamit dan Abu Lubabah, serta konteks menjelang Perang Uhud. Intinya, ayat ini diturunkan dalam situasi konflik dan strategi militer, bukan dalam suasana damai atau pemilihan pemimpin sipil. Karena itu, menjadikannya dasar larangan memilih pemimpin non-Muslim dalam sistem demokrasi modern dianggap kurang tepat secara historis dan tafsir.

Tiga pesan utama dari ayat ini dapat diambil. Pertama, pentingnya memilih mitra yang dapat dipercaya dalam urusan krusial masyarakat. Kedua, Islam menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama dan menolak pengkhianatan. Ketiga, ayat ini tidak membahas kepemimpinan politik, melainkan etika bersekutu dalam konteks konflik. Pemimpin dalam Islam idealnya menegakkan keadilan bagi semua, terlepas dari latar agama atau etnis (BBC, 2016).

Lebih dari itu, Aksi 212 tidak hanya menjadi manifestasi dari ekspresi keagamaan umat Islam di Indonesia, tetapi juga dapat dibaca sebagai titik balik penting dalam kebangkitan Islam konservatif di ranah publik. Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam konfigurasi sosial-politik umat Islam, terutama dalam cara mereka memproduksi, mendistribusikan, dan mengafirmasi narasi keagamaan melalui berbagai saluran komunikasi, baik digital maupun konvensional.

Respon masyarakat terhadap kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara umum dapat dipetakan ke dalam tiga kategori: radikal, moderat, dan apatis. Kelompok radikal mencerminkan individu atau komunitas yang secara aktif dan militan menuntut agar Ahok dijatuhi hukuman penjara, sering kali dengan dasar interpretasi literal terhadap teks-teks agama. Motivasi kelompok ini sangat kompleks dan mencakup kepentingan politis, sentimen keagamaan yang mendalam, serta dorongan ekonomi atau sosial lainnya.

Sebaliknya, kelompok moderat mencoba melihat kasus ini secara lebih proporsional dan rasional. Mereka mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataan Ahok, namun tetap berusaha menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, tidak semata-mata sebagai penghinaan terhadap agama. Dalam kelompok ini, peran tokoh-tokoh agama seperti kiai dan ustaz cukup penting dalam membentuk pandangan yang seimbang di tengah arus informasi yang begitu deras.

Sementara itu, kelompok apatis memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam diskursus publik mengenai Aksi 212. Ketidakterlibatan mereka bisa disebabkan oleh keterbatasan informasi, sikap pragmatis, atau penilaian bahwa isu tersebut terlalu sarat dengan kepentingan politik sehingga mereka memilih bersikap netral atau pasif.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti peran strategis media sosial dan media massa dalam membentuk opini publik dan menyebarkan narasi keagamaan (Engelke, 2010). Akun-akun seperti *bela.quran* di berbagai platform digital memainkan peran aktif dalam menyebarkan ajakan dan narasi keagamaan yang mendukung Aksi 212, sering kali dengan pendekatan emosional yang menekankan pentingnya membela agama. Media massa, baik yang arus utama maupun alternatif, juga menunjukkan polarisasi dalam cara mereka meringkaskan peristiwa, sebagaimana terlihat dari judul-judul berita yang cenderung provokatif dan tidak netral (Pradipta, Warih, et al., 2018).

Aksi 212 pada akhirnya menjadi arena di mana kelompok-kelompok Islam konservatif berhasil memperoleh panggung publik yang luas. Organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) tidak hanya berperan sebagai motor penggerak aksi, tetapi juga berhasil meringkaskan ulang konservatisme Islam sebagai bagian dari budaya populer. Bahkan, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kesulitan mengendalikan wacana di akar rumput mereka.

Narasi yang berkembang selama dan setelah Aksi 212 menunjukkan bahwa sentimen agama tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi alat mobilisasi politik yang sangat efektif (Gueorguiev et al., 2019). Fenomena ini merefleksikan relasi kompleks antara agama, otoritas, media, dan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Hadiz, 2016).

B. Misinterpretasi Hadis dalam Aksi 212

Meskipun objek material dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, namun berbagai literatur keagamaan lainnya, termasuk hadis, juga marak beredar dan dimaknai secara luas di tengah masyarakat, baik dalam ruang daring maupun luring. Fenomena ini mencerminkan betapa masif dan dinamisnya isu keagamaan dalam kehidupan publik. Penelitian ini menyoroti bahwa tidak semua hadis yang beredar dimanfaatkan untuk kepentingan politis, seperti dalam konteks Aksi 212; sebagian hadis tetap digunakan secara proporsional sebagai rujukan ajaran Islam.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat setidaknya enam hadis yang digunakan secara sistematis, terutama dalam rangka mobilisasi massa. Salah satu dimensi penting yang teridentifikasi adalah terjadinya misinterpretasi terhadap hadis-hadis tersebut—khususnya yang berlangsung di ranah digital. Misinterpretasi ini dilakukan oleh figur-figur keagamaan yang populer di media sosial dan kanal daring seperti YouTube, di antaranya Adi Hidayat, Felix Siauw, dan Khalid Basalamah. Ketiganya sering kali menjadi rujukan bagi publik Muslim digital, meski dalam beberapa kasus, penafsiran mereka terhadap teks-teks keagamaan dinilai telah keluar dari konteks aslinya dan dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu yang berkonotasi politis. Berikut ini adalah enam redaksi hadis yang paling sering muncul dan digunakan dalam narasi Aksi 212 serta misinterpretasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut di atas.

Adi Hidayat

Adi Hidayat dalam kajiannya mengungkapkan “...Pembelaan tentang nilai-nilai Islam, yang pertama aspeknya positif, masalah-masalah yang baik. Yang kedua, Ketika muncul persoalan yang diduga negatif sifatnya. Anda mesti punya rasa di sini. Dalam Bahasa nabi man ra’a minkum munkaran, kalau terjadi sesuatu kemunkaran, sesuatu yang tidak benar, kemunkarannya terkait dengan agama kita khususnya, misal kita itu harus menunjukkan rasa kesal, itu menunjukkan rasa imannya. Kalau tidak ada rasa, iman anda bermasalah itu.”

Dalam pemanfaatan hadis, Adi Hidayat menunjukkan pola khas, yakni dengan terlebih dahulu mengemukakan argumentasinya sebelum kemudian menyertakan kutipan hadis sebagai penguat. Pola politisasi seperti ini mengindikasikan bahwa argumentasi telah lebih dulu terbentuk—baik secara spontan maupun dirancang—kemudian diperkuat melalui penyisipan dalil-dalil keagamaan untuk memberikan legitimasi terhadap narasi yang disampaikan (Domke & Coe, 2010). Berikut redaksi hadis yang dikutip oleh Adi Hidayat:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ

“Rasulullah SAW bersabda: Tanda orang munafik tiga; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati.”

Felix Siauw

Felix Siauw menilai bahwa tindakan Ahok merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad, yang ia samakan dengan peristiwa ketika Nabi sendiri pernah menjadi sasaran cercaan. Ia menyampaikan bahwa dalam kisah tersebut, kemarahan atas penghinaan kepada Nabi justru dirasakan oleh sahabat terdekat, Abu Bakar. Mirip dengan pendekatan yang dilakukan oleh Adi Hidayat, Felix memulai penjelasannya dengan membangun argumen emosional sebelum mengutip hadis yang menegaskan bahwa tidak merasa marah atas hinaan kepada Nabi adalah tanda lemahnya iman seseorang.

Dalam momen Aksi 212, Felix secara eksplisit menyampaikan bahwa ketidakmarahan atas penghinaan kepada Nabi mencerminkan adanya masalah dalam keimanan seseorang. Pernyataan ini ia sampaikan di tengah kerumunan massa, menegaskan pentingnya rasa hormat dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad sebagai bagian dari keimanan seorang Muslim. Ia menyatakan, “Jadi kalau antum tidak panas atas hinaan terhadap Rasulullah, berarti ada kelainan dari kalian semua,” sebelum membacakan terjemahan hadis—tanpa menyertakan lafaz Arabnya—kepada para peserta aksi.

Pola ini mencerminkan strategi yang serupa dengan yang digunakan oleh Adi Hidayat, yakni menyampaikan opini pribadi terlebih dahulu, lalu memperkuatnya dengan kutipan dari teks suci. Namun berbeda dengan Adi Hidayat, Felix hanya menyampaikan terjemahan matan hadis, dan setelah ditelaah, terjemahan tersebut ternyata mengandung kekeliruan. Dalam versi yang disampaikan Felix, seolah-olah yang dicela adalah Rasulullah dan Abu Bakar membela; padahal, dalam redaksi asli hadis, justru Abu Bakar yang dicela, dan Nabi meninggalkan tempat karena tidak menyukai perdebatan yang terjadi antara Abu Bakar dan si pencela. Penjelasan Nabi kemudian datang setelah Abu Bakar menyusul dan menanyakan alasannya. Berikut adalah hadis yang dimaksud oleh Felix Siauw:

حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة: أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله، وقع الشيطان، فلم أكن عز وجل، إلا أعزّ ل لأقعد مع الشيطان. (ثم قال): يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلومة فيغضي عنها الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة، إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة، إلا زاده الله عز وجل بها قلة.

Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Ajlân, Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, (dikatakan bahwa): Sesungguhnya (ada) seorang laki-laki mencela Abu Bakar, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk. (Kejadian itu) membuat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terheran-heran dan tersenyum. Kemudian, ketika Abu Bakar (mulai) banyak menanggapi (atau membantah) sebagian perkataan (celaan) laki-laki tersebut, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berdiri (pergi). Abu Bakar pun menyusul Nabi, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, orang itu mencelaku, engkau (hanya) duduk. Ketika aku membantah sebagian perkataannya, engkau berdiri (pergi) dan marah. Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantah(nya) utukmu. Ketika kau (mulai) membantah sebagian perkataan (celaan)nya, setan datang. Aku tidak (akan pernah mau) duduk bersama setan." Kemudian Rasulullah berkata: "Wahai Abu Bakar, (ada) tiga hal (yang menjadi) hak (seorang hamba): (1) Tidaklah seorang hamba (Allah) yang terzalimi dengan kezaliman, lalu dia pasrahkan kepada Allah 'Azza wa Jalla, kecuali Allah pasti memenangkan(nya) dengan pertolongan(-Nya), (2) Tidaklah seseorang yang membuka pintu pemberian (atau kedermawanan) yang dia harapkan (dapat menjadi) penyambung (silaturahmi atau persaudaraan), kecuali Allah pasti tambahkan (harta) yang banyak (kepadanya), dan (3) Tidaklah seseorang yang membuka pintu permintaan yang dia harapkan untuk (mendapatkan harta) yang banyak, kecuali Allah 'Azza wa Jalla pasti tambahkan kekurangan (kepadanya). (Imam Ahmad bin Handal, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, tt, juz 15, h. 390. Musnad Ahmad-9251)

Polanya berulang dalam penggunaan hadis-hadis lain oleh Felix, seperti ketika ia menyampaikan hadis tentang larangan melaknat secara berlebihan, serta hadis mengenai Hamzah sebagai pemimpin para syuhada, yang ia gunakan untuk menekankan pentingnya menyuarakan kebenaran meski harus menghadapi risiko kematian. Namun, ini menunjukkan bentuk politisasi karena konteks hadis yang dikutip berbeda jauh dengan situasi Aksi 212. Hadis tersebut aslinya muncul dalam konteks peperangan, sementara Aksi 212 adalah sebuah gerakan massa dengan nuansa politik yang kompleks. Hal ini menciptakan jarak besar antara konteks normatif teks dan penerapannya dalam realitas kontemporer. Penggunaan hadis tersebut, terutama yang mengangkat semangat kepahlawanan dan syahid, tampaknya juga bertujuan membakar semangat peserta dan menarik partisipasi massa yang lebih besar sebagaimana pola yang mirip dalam kasus yang terjadi di

Amerika Serikat saat pidato presiden (Domke & Coe, 2010). Berikut hadis yang dikutip.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّجَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا
الْبِدِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

Ceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya al-Azdi al-Basri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, dari Isra'il, dari al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka mengumpat, suka berkata kotor, atau suka berbicara dengan kata-kata yang keji." Abu 'Isa berkata, "Ini adalah hadis yang hasan gharib (baik tapi jarang ditemukan), dan telah diriwayatkan dari Abdullah tanpa melalui jalur ini."

Berikut hadis yang juga dikutip oleh Felix Siauw tentang Hamzah Pemimpin Para Syuhada:

حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو أسامة الكلبي ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ثنا محمد بن سليمان
بن الأصبهاني عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن الحزور: ثنا الأصبغ بن نباتة قال سمعت علي بن أبي طالب
يقول قال رسول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الله صلى الله عليه وسلم

Diceritakan kepada kami Ali bin Sa'id al-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah al-Kalbi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran bin Abi Laila, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman bin al-Asbahani, dari Abu Ishaq al-Syaybani, dari Ali bin al-Hazhur, dari al-Asbagh bin Nabatah, dia berkata, "Saya mendengar Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib.'

Khalid Basalamah

Hadis ini dikutip oleh Khalid Basalamah dalam ceramahnya saat menjawab pertanyaan jamaah mengenai apakah diperbolehkan mengikuti demo 212. Secara umum, Ustaz Khalid menyampaikan pandangannya bahwa tindakan Ahok sama sekali tidak dapat dibenarkan. Ada tiga makna yang terkandung dalam perkataan Ahok. Pertama, Ahok menyatakan bahwa Allah (pemilik Al Maidah ayat 51) bohong, yang merupakan suatu kesalahan besar. Kedua, Ahok mengatakan bahwa ayat Al Maidah ayat 51 itu palsu. Ketiga, Ahok menuduh para ulama yang menyampaikan ayat tersebut berbohong. Oleh karena itu, tindakan Ahok sangat fatal, bahkan jika dilakukan oleh seorang Muslim, hukuman yang sesuai dengan syariat adalah penggal atau qisas.

Kemudian, Khalid memberikan gambaran tentang hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang melibatkan Ahok. Sebagaimana kisah Sumayyah yang syahid saat disiksa, justru semakin menguatkan imannya, karena Sumayyah meyakini bahwa penyiksaannya adalah takdir Allah untuk menambah keimanannya. Khalid menyimpulkan bahwa ucapan Ahok terjadi karena Allah mengizinkan, dan justru peristiwa tersebut dapat menyatukan umat Islam serta mengurangi perselisihan di antara mereka. Khalid menambahkan, jangan berterima kasih kepada Ahok (karena menyatukan umat Islam), jika saya punya kekuasaan, saya sudah qisas (penggal) dia.

Namun dalam Islam, itu tidak diperbolehkan karena sudah ada pihak yang berwenang (pemerintah) untuk mengurus hal tersebut.

Sebagai penutup, Khalid membahas tentang kaum munafik. Khalid menjelaskan bahwa banyak orang munafik yang muncul dan berbicara tentang tafsir padahal mereka tidak mengerti agama. Ia menguatkan argumennya dengan hadis nabi yang memperingatkan tentang bahaya ulama yang tergelincir. Khalid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama di sini adalah mereka yang karena tekanan dunia membolehkan hal-hal yang haram. Ia juga menambahkan hadis lain mengenai bahaya kaum munafik yang pandai berbicara, yang membolak-balikkan ayat, padahal tidak memiliki ilmu yang memadai.

Dalam hal ini, Khalid menggunakan hadis tersebut untuk 'menandai' orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik yang pandai berbicara. Ia menggunakan hadis ini untuk mendukung argumennya bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa Ahok tidak bersalah adalah mereka yang tidak memahami tafsir dan hanya pandai berbicara.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ عَزْوَانَ عَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْكُرْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْهَيْدِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ
الْبَسَانِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Dailam bin Ghazwan Abd'i, telah menceritakan kepada kami Maymun al Kurdi, telah menceritakan kepada saya Abu Utsman al-Nahdi, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan bagi umatku adalah setiap munafik yang pandai dalam berbicara."

C. Spektrum Respon Publik terhadap Aksi 212: Antara Polarisasi, Moderasi, dan Apatisme

Berbagai tanggapan muncul terkait polemik Ahok dan Aksi 212. Respons tersebut tidak hanya berupa komentar di kolom komentar media sosial, tetapi juga dalam bentuk foto, tulisan, dan gambar yang turut memeriahkan dinamika Aksi 212 di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Politisasi hadis dalam bentuk non-lisan memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi viral dan tersebar secara luas, karena dapat menarik perhatian pengguna media sosial dan dengan cepat menjadi topik perbincangan publik. Pola politisasi hadis non-lisan berbeda dengan politisasi hadis lisan. Biasanya, kutipan non-lisan menggunakan model penyertaan kata kunci (Azhari, 2018) dari matan hadis, seperti misalnya kata kunci "munafik" dalam contoh hadis di atas. Hal ini bukan hanya sebuah dugaan, tetapi ada indikasi lain yang memperkuat klaim peneliti, seperti penyandingan kata kunci tersebut dengan konteks Aksi 212.



Gambar 1. Spanduk tolak kuburkan jenazah di sebuah TPU di kawasan Rawalele, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dipasang oleh simpatisan Aksi 212

Meme

Dalam perhelatan Aksi 212, muncul karakter meme yang sangat populer, yaitu Wiro Sableng. Kehadiran karakter Wiro Sableng dalam Aksi 212 disebabkan oleh kesamaan antara nama aksi tersebut, yaitu 212, dengan angka rajah 212 yang ada di dada Wiro Sableng. Selain itu, Wiro Sableng adalah tokoh pendekar yang dikenal dengan berbagai kesaktiannya dan peranannya sebagai penumpas kejahatan. Oleh karena itu, kelompok yang mendukung Aksi 212 dengan bangga mengangkat karakter Wiro Sableng seolah-olah menjadi simbol dari aksi tersebut. Menjelang dan setelah Aksi 212, banyak tersebar meme kartun dengan karakter Wiro Sableng, seperti yang terlihat dalam salah satu poster di atas. Kehadiran karakter Wiro Sableng ini sejalan dengan hadis-hadis yang sering disebarakan menjelang Aksi 212, seperti hadis tentang menanggulangi kemunkaran, yang memiliki pesan utama yang sangat cocok dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui karakter Wiro Sableng.



Gambar 2. Karakter Meme Viral Wiro Sableng dalam Aksi 212 (rmol.id)



Gambar 3. Meme Tokoh Aksi 212 (Medcom.id)



Gambar 4. Meme Massa Aksi 212 (serikatnews dan portalnawacita)

Kedua gambar di atas adalah meme yang mendukung Aksi 212, menggambarkan tokoh-tokoh Aksi 212 serta banyaknya peserta aksi. Selain itu, kedua gambar tersebut juga menampilkan lafaz *Laa ilaa ha ilallah* dengan latar belakang hitam. Hal ini sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, yang mengatakan bahwa meme tersebut seolah ingin menyampaikan bahwa demo (Aksi 212) bukanlah sekadar demonstrasi biasa, melainkan sebagai bentuk syiar untuk menegaskan kalimat *Laa ilaa ha ilallah*.



Gambar 5. Meme Kritik Jumlah Massa Aksi 212

Kedua meme tersebut menyampaikan pesan bahwa massa Aksi 212 diduga merupakan massa bayaran, yang menjelaskan mengapa jumlah peserta sangat banyak. Meme ini seolah ingin mengkritik perdebatan mengenai jumlah peserta Aksi 212, di mana panitia mengklaim ada antara 2 hingga 7,5 juta orang, sementara keterangan pers dari pihak kepolisian menyatakan hanya sekitar 200 ribu orang. Pertukaran meme ini menjadi salah satu bentuk dinamisnya diskusi dan interaksi dalam masyarakat Muslim digital.

Poster



Gambar 6. Poster Aksi 212

Selain meme, respon lainnya berupa poster, baik yang dicetak digital maupun yang dibuat tangan, banyak bermunculan dalam Aksi 212. Sebagai contoh, poster di atas menyuarakan pentingnya untuk menangkap dan menghukum Ahok yang dianggap sebagai penista AlQur'an, uniknya, pada bagian bawah poster terdapat tulisan "#Islam Rahmatan Lil 'Alamin."



Gambar 7. Banner Aksi 212



Gambar 8. Poster Khilafah Aksi 212

Aksi 212 telah dibawa ke ranah politis. Sebagai contoh, poster di sebelah kiri menyuarakan perlunya memberikan hukuman kepada Ahok meskipun dia telah meminta maaf kepada umat Islam Indonesia. Poster ini menarik karena bertentangan dengan hadis yang menganjurkan untuk saling memaafkan, yang justru diresapi secara berbeda oleh kelompok ini. Kelompok ini mengambil posisi oposisi terhadap hadis yang menganjurkan memaafkan. Uniknya, poster ini dibawa oleh sekelompok pemuda yang juga mengibarkan bendera tauhid khas HTI. Hal ini menunjukkan bahwa Aksi 212 tidak hanya soal polemik Ahok, tetapi juga menjadi ajang unjuk diri

atau promosi ormas, serta sebagai sarana positioning atau pemosisian diri ormas tersebut, untuk menunjukkan pihak mana yang mereka dukung.

D. Jejak Digital Aksi 212: Media Sosial sebagai Ruang Resonansi Kolektif

Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat berpengaruh di era digital. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube memfasilitasi penyebaran informasi, termasuk mengenai Aksi 212. Penelitian ini berfokus pada empat platform tersebut, yang digunakan untuk politisasi hadis dalam Aksi 212. Politisasi hadis terlihat dalam berbagai bentuk konten di media sosial, seperti gambar, video, tagar, cuitan, dan status yang menarik perhatian serta memicu respon dari masyarakat digital. Konten-konten ini sering kali berisi kutipan hadis yang memperkuat narasi terkait Aksi 212. Beberapa di antaranya bahkan provokatif, untuk menarik perhatian pengguna (Abdullah, 2017). Penggunaan tagar #aksi212 menjadi salah satu bentuk politisasi, dengan mengaitkan konten dengan peristiwa tersebut. Namun, tagar ini juga sering disalahgunakan untuk tujuan popularitas dan eksposur. Politisasi hadis juga muncul dalam cuitan di Twitter dan status di Facebook, dengan narasi yang dirancang untuk memancing respon emosional dan persuasif, agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Respon masyarakat terlihat dalam bentuk like, share, komentar, dan diskusi, yang mencerminkan penerimaan atau penolakan terhadap politisasi tersebut.

Dalam penggunaan media sosial sebagai medium untuk meresonansikan informasi, paham, dan politisasi hadis Aksi 212 (Ahyar & Alfitri, 2019), terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kedua bentuk politisasi hadis, baik lisan maupun non-lisan, memanfaatkan media sosial sebagai medium untuk menyebarkan pesan. Video ceramah yang berisi politisasi hadis, meme, poster, banner, konten, dan tagar diunggah melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Pola politisasi hadis lisan dan non-lisan menunjukkan perbedaan signifikan. Politisasi hadis lisan umumnya mengutip hadis dengan narasi panjang, di mana argumen terlebih dahulu disampaikan sebelum menguatkannya dengan kutipan hadis. Hal ini wajar, mengingat Aksi 212 melibatkan massa yang besar (Sauki, 2020), sehingga narasi argumen perlu didahulukan untuk menggerakkan massa. Sementara itu, politisasi hadis non-lisan lebih sering menggunakan kata kunci dari matan hadis yang diterjemahkan ke dalam bentuk meme, poster, banner, konten, dan tagar (Azhari, 2018).

Kedua, media massa menjadi ruang bagi dinamika antara kelompok pro dan kontra Aksi 212. Perang siber yang berupa saling balas cuitan, meme, hingga poster digital menjadi salah satu buktinya (Engelke, 2010). Media massa juga digunakan untuk klarifikasi, meskipun dengan berbagai motif di baliknya (Pradipta, Hidayah, et al., 2018). Penelitian ini terbatas pada politisasi hadis yang berasal dari kelompok pro Aksi 212, namun beberapa dinamika dunia siber juga turut disinggung.

Secara umum, hadis-hadis yang digunakan oleh kelompok pro Aksi 212 dapat dibagi menjadi dua kategori: hadis yang digunakan untuk menggerakkan massa (Gueorguiev et al., 2019) dan hadis yang digunakan untuk mengkritik mereka yang enggan mengikuti Aksi 212. Hadis-hadis yang sering dipolitisasi untuk menarik simpati dan menggerakkan massa mencakup hadis tentang kewajiban mengubah kemunkaran, hadis tentang Abu Bakar yang pernah dicela, hadis tentang larangan

melaknat, dan hadis tentang Hamzah sebagai pemimpin syuhada karena keberaniannya menyuarakan kebenaran. Sedangkan hadis-hadis yang sering digunakan untuk mengkritik mereka yang enggan ikut Aksi 212 adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik dan hadis tentang orang munafik yang pandai berbicara. Berkat politisasi hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini, mereka yang enggan terlibat dalam Aksi 212 dilabeli sebagai munafik, atau jika mereka adalah ulama, mereka disebut ulama yang tergelincir.

Kelompok pro Aksi 212 juga menggunakan media sosial untuk melakukan klarifikasi. Sebagai contoh, akun Bela Quran mengkampanyekan pernyataan sikap GNPf MUI yang didasarkan pada fatwa MUI tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al-Qur'an dan ulama. Akun ini terus mengkampanyekan betapa jahatnya Ahok, yang dihukum karena menghina Islam, Al-Qur'an, dan ulama, dan memproduksi banyak konten provokatif untuk mengajak orang bergabung dalam Aksi Bela Islam III atau Aksi 212 (Septiana et al., 2020).

Pada akhirnya, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk meresonansikan informasi, paham, dan politisasi hadis terkait Aksi 212 terbukti sangat berpengaruh. Di media sosial tercipta ruang bagi siapa saja untuk membagikan aspirasi, paham, dan kreativitas. Satu unggahan dapat mengundang respon, bahkan menghasilkan unggahan lain dengan narasi oposisi. Dinamika ini memengaruhi persepsi masyarakat secara luas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pandangan mereka terhadap sosok Ahok, yang juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017 (Prayogi, 2019). Meskipun politisasi hadis dalam Aksi 212 bukan faktor tunggal, namun jelas memberikan dampak pada elektabilitas Ahok dalam Pilkada tersebut.

Simpulan

Penelitian ini menggambarkan fenomena politisasi hadis dalam politik praktis Indonesia, dengan fokus pada peristiwa Aksi 212 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Politisasi hadis merujuk pada penggunaan hadis dalam dunia politik untuk memperoleh dukungan atau merugikan lawan politik. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk politisasi hadis dalam Aksi 212 dan dampaknya terhadap elektabilitas Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menerapkan teori politisasi agama dari Domke dan Coe, yang sebelumnya digunakan untuk menganalisis kasus serupa di Amerika Serikat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan populisme Islam ala Vedi R. Hadiz, yang menyoroti bagaimana agama, khususnya teks hadis, digunakan untuk memobilisasi massa.

Dengan menganalisis ujaran yang mengandung politisasi hadis dan media yang digunakan untuk menyebarkannya, penelitian ini mengidentifikasi empat cara politisasi hadis yang dilakukan oleh ustaz-ustaz online dalam Aksi 212: manipulasi konteks hadis, penyelewengan makna hadis, filter penyampaian hanya hadis yang mendukung argumen, dan pemanfaatan hadis untuk mendorong mobilisasi massa. Meskipun politisasi hadis bukan faktor utama yang secara langsung memengaruhi elektabilitas Ahok, penelitian ini menemukan bukti bahwa politisasi ini secara kontekstual berkontribusi dalam menurunkan elektabilitas Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, melalui perubahan persepsi masyarakat yang tercermin dalam

berbagai respons seperti meme, poster, banner, konten, dan tagar. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi hadis memiliki dampak signifikan dalam politik praktis Indonesia, khususnya dalam konteks Aksi 212 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Referensi

- Abdallah. (2020). *Agama Rentan Jadi Komoditas Politik—PPIM UIN Jakarta*. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/12/14/agama-rentan-jadi-komoditas-politik/>
- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif. *An-Nida'*, 41(2). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4654>
- Ahyar, M. & Alfitri. (2019). Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I1>
- Altinordu, A. (2010). The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective. *Politics & Society*, 38(4), 517–551. <https://doi.org/10.1177/0032329210381238>
- Arigi, F. (2019). *Survei Atma Jaya Sebut Politisasi Agama Perburuk Demokrasi*. <https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi>
- Ayata, S. (2003). Patronage, Party, and State: The Politicization of Islam in Turkey. *Middle East Journal*. <https://www.jstor.org/stable/4328895>
- Azhari, A. (2018). Menyikapi Fenomena Labelling Olok-Olok Politik Di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 3(2), 207–233. <https://doi.org/10.14421/LIVINGHADIS.2018.1624>
- Azra, A. (n.d.). *Indonesian Islam, Election Politics and Beyond*. https://www.asiaportal.info/asiaportal_site/wp-content/uploads/2022/01/2004-december-no4.pdf#page=12
- Baswedan, A. R. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory. *Asian Survey*, 44. <https://doi.org/10.1525/AS.2004.44.5.669/0>
- BBC. (2016). *Pilkada DKI: Antara Menyukai Dan Memilih Calon*. <https://www.bbc.com/indonesia/>
- Burhani, A. N. (2016). Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. *Maarif Institute*, 11(2). https://www.academia.edu/download/54473908/Aksi_Bela_Islam_Jurnal_Maarif.pdf
- Domke, D., & Coe, Ke. (2010). *The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America*. Oxford University Press.
- Engelke, M. (2010). Religion and the Media Turn: A Review Essay. *American Ethnologist*, 37(2), 371–379. <https://doi.org/10.1111/J.1548-1425.2010.01261.X>
- Fanany, I., & Fanany, R. (2020). Religion and Populism: The Aksi 212 Movement in Indonesia. In *Populism, Democracy and Community Development* (pp. 245–258).

- <https://bristoluniversitypressdigital.com/view/book/9781447353867/ch014.xml>
- Gueorguiev, D., Ostwald, K., & Schuler, P. (2019). Rematch: Islamic Politics, Mobilisation, and the Indonesian Presidential Election. *Political Science*, 70(3). <https://doi.org/10.1080/00323187.2019.1584733>
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316402382>
- Haris, S. (2021). Politicization of Religion and the Failure of Islamic Parties in the 1999 General Election. In *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond* (pp. 61–76). <https://doi.org/10.4324/9781315028446-4>
- Indrayana, D. (2023, June). *Denny Indrayana on Twitter: 'Cawe-Cawe Presiden Jokowi Yang Menegaskan Tidak Akan Netral Semakin Membahayakan Keadilan Dalam Pilpres 2024.'* <https://twitter.com/dennyindrayana/status/1664818699474452480>
- Maarif, A. S., Geovanie, J., Sukma, R., Ul, F. R., & others. (2023). *Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, Dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25472/>
- Melyani, M., & Dalimounthe, R. P. (2020). Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2), 175–182. <https://doi.org/10.15575/DIROYAH.V4I2.6449>
- Muhajirin. (2016). *Politisasi Ujaran Nabi* (A. Z. Mubarak, Ed.). Maghza Books.
- Pradipta, A. L., Hidayah, N. W. N., Haya, A. N. A., Ervania, C., & Kristanto, D. (2018). Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) Di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika. *INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi*, 48(1).
- Pradipta, A. L., Warih, N., Hidayah, N., Nafiatun, A., Haya, A., Ervania, C., & Kristanto, D. (2018). Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) Di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 48(1), 109–124. <https://doi.org/10.21831/informasi.v48i1.20203>
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2). <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/1083>
- Sauki, M. (2020). Diskursus Wacana Keagamaan Pasca Aksi 212 Di Indonesia. *EDUPROF: Islamic Education Journal*, 2(1), 2723–2034. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.31>
- Septiana, E. N., Al-Hamdi, R., & Gusmi, A. D. (2020). Aksi 212 Dan Kemenangan Anies-Sandi Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2). <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/8923>